

LAPORAN HASIL

STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN SECARA LESTARI DAN BERKELANJUTAN



KERJASAMA



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN JEMBER**



**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS JEMBER**

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami haturkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penyusunan Draft Laporan Akhir “Model Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan secara Lestari dan Berkelanjutan Kabupaten Jember” dapat diselesaikan dengan baik atas kerjasama dengan semua pihak.

Maksud kegiatan dari studi ini adalah ditemukannya suatu model dan strategi pengembangan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dan berkelanjutan (*sustainability*) kebutuhan dan lingkungan masyarakat sekitar hutan tetap terjaga. Adapun tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi pemanfaatan sumberdaya hutan bersama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, serta untuk pengembangan Hutan lestari di Kabupaten Jember.

Akhirnya, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan masukan dan saran sehingga nantinya hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat secara berkelanjutan bagi pembangunan di Kabupaten Jember ke depan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan Kegiatan.....	5
1.3 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Teori Pemberdayaan Masyarakat	7
2.1.1 Pengertian Pemberdayaan	7
2.1.2 Siklus dan Proses Pemberdayaan Masyarakat	17
2.1.3 Lingkup dan Tingkatan Pemberdayaan	21
2.1.4 Tujuan Pemberdayaan	22
2.1.5 Tahap-tahap Pemberdayaan	23
2.1.6 Sasaran Pemberdayaan	23
2.1.7 Pemdekatan Pemberdayaan	24
2.1.8 Faktor - faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat	24
2.2 Pengembangan Kapasitas	25
2.2.1 Pengembangan Masyarakat	25
2.2.2 Elemen-elemen dalam Pengembangan Kapasitas	28
2.3 Evaluasi Pemberdayaan	29
2.3.1 Prinsip Evaluasi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas	31
2.3.2 Model Evaluasi Pemberdayaan Fujikake	32
2.4 Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Pelibatan Masyarakat Desa Hutan.....	34
2.5 Pengembangan Kawasan	41
2.6 Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat untuk Pengembangan Kawasan Hutan	44
BAB 3. METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Unit Analisis	48

3.3 Jenis dan Sumber Data	49
3.4 Langkah-langkah Penelitian	49
3.5 Metode Analisis Data	50
3.5.1 Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT	52
3.5.2 Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT	55
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
4.1 Kondisi Geografis Kabupaten Jember	59
4.2 Karakteristik Sosio Demografi	60
4.3 Kondisi Perekonomian Secara Umum	61
4.4 Gambaran Kecamatan Tempurejo Sebagai Wilayah Sampel	65
4.4.1 Kondisi Sosial Demografi Kecamatan Tempurejo	65
4.4.2 Kondisi Ekonomi Kecamatan Tempurejo	67
4.5 Hasil Analisis	69
4.5.1 Konsep Pemberdayaan di Kecamatan Tempurejo	69
4.5.2 Dasar Hukum Dilakukannya Pemberdayaan	71
4.5.3 Program Pemberdayaan Masyarakat di TNMB.....	73
4.5.4 Pemberdayaan Masyarakat oleh Perhutani	86
4.5.5 Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	89
4.6 Identifikasi Lingkungan Internal: Kekuatan vs Kelemahan ..	91
4.7 Identifikasi Lingkungan Eksternal: Peluang vs Ancaman	92
4.8 Strategi Kebijakan Pemberdayaan yang Ideal bagi Masyarakat Sekitar Hutan di Kecamatan Tempurejo	94
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1 Kesimpulan	100
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	

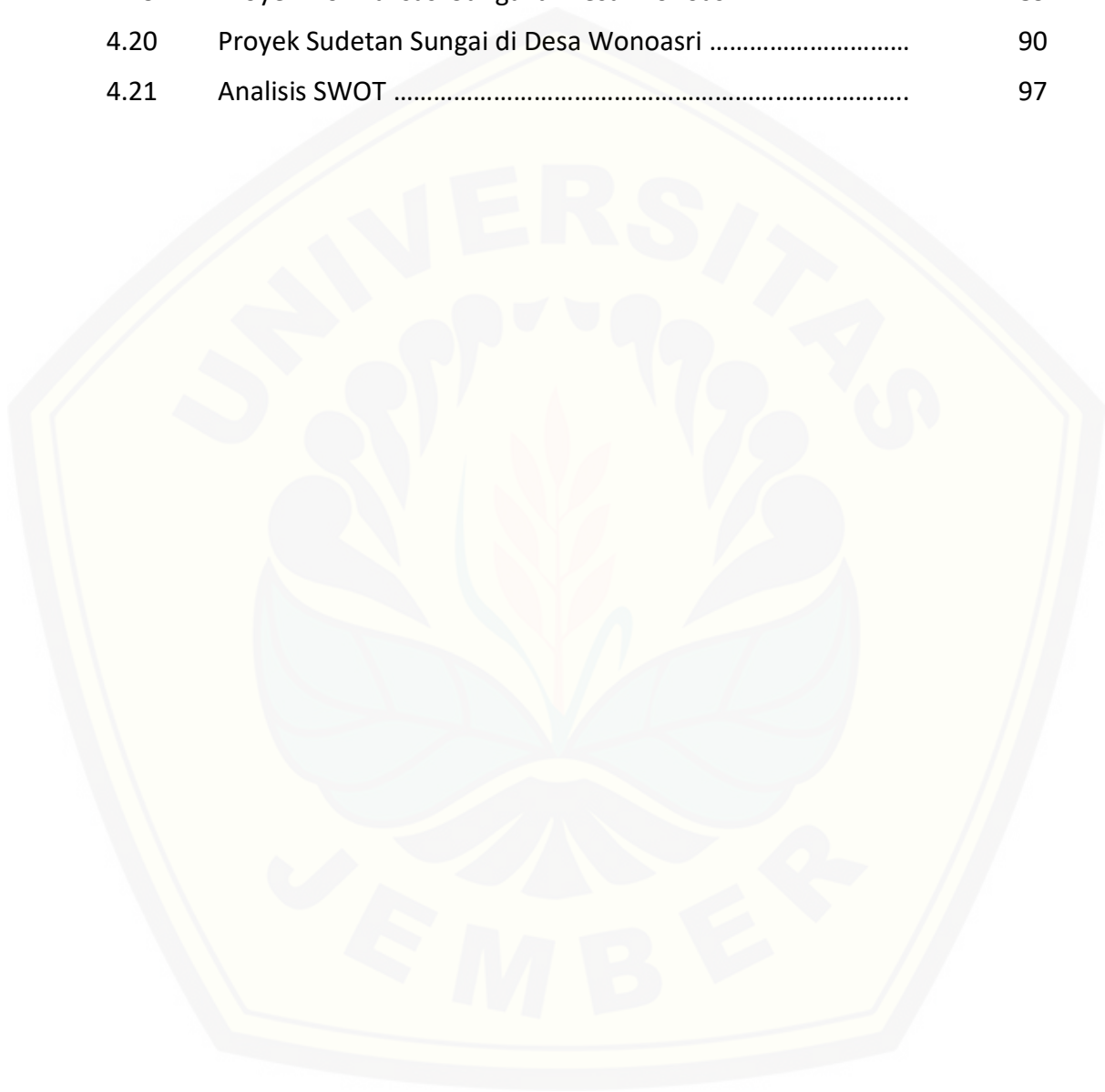
DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
2.1	Sintesa Pustaka	46
3.1	Skor dan Pembobotan Analisis SWOT secara Kuantitatif	56
4.1	Kondisi Sosial Demografi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember	66
4.2	PDRB Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2009 – 2012	67
4.3	Bantuan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tempurejo dari TNMB	76
4.4	Usaha Budidaya Jamur Tiram di Kecamatan Tempurejo	83
4.5	Lingkungan Internal: Kekuatan	91
4.6	Lingkungan Internal: Kelemahan	92
4.7	Lingkungan Eksternal: Peluang	93
4.8	Lingkungan Eksternal: Ancaman	93
4.9	Strategi dalam analisis SWOT	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
2.1	Siklus Pemberdayaan	19
2.2	Proses Pemberdayaan	20
2.3	Tiga Tipe Hasil Pemberdayaan	33
3.1	Analisis SWOT	51
3.2	Matriks SWOT Kearns	54
3.3	Kuadran Analisis SWOT	57
4.1	Wilayah Kabupaten Jember yang Terbagi dalam 31 Kecamatan	60
4.2	Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Jember, Tahun 2003 - 2010	63
4.3	Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2002 - 2010	64
4.4	Distribusi PDRB ADHB Berdasarkan Lapangan Usaha, 2010	65
4.5	Perkembangan Subsektor Pertanian dalam Membentuk PDRB Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2009 – 2012.....	68
4.6	Rata-rata Kontribusi Subsektor Pertanian Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Selama Kurun Waktu 2009 – 2012	69
4.7	Area Hutan Gundul di Desa Curah Takir	71
4.8	Posisi Wilayah Taman Nasional Meru Betiri	74
4.9	Pemanfaatan Lahan Sela di antara Tegakan	74
4.10	Jenis Ternak yang Diberikan oleh TNMB	75
4.11	Potensi Tanaman Obat di Desa Andongrejo dan Curahnongko	76
4.12	Merek Keripik Nangka dari <i>Home Industry</i> di Desa Curahnongko	80
4.13	Mesin Pengolah Kripik Bantuan Kedutaan Finlandia	80
4.14	Usaha Budidaya Jamur Tiram di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo	84
4.15	Usaha Budidaya Empon-empon di Desa Andongrejo dan Wonoasri	85

4.16	Wawancara dengan Warga Desa Curahnongko	86
4.17	Area Perhutani dan Lahan Pembibitan Sengon di Curahtakir	88
4.18	Petikan Wawancara dengan Masyarakat di Desa Curahtakir	88
4.19	Proyek Normalisasi Sungai di Desa Wonoasri	89
4.20	Proyek Sudetan Sungai di Desa Wonoasri	90
4.21	Analisis SWOT	97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Uraian	Halaman
1	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	73
2	Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	
3	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	
4	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan	
5	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kehutanan	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Akan tetapi intinya adalah sama. Definisi lain, menjelaskan bahwa hutan adalah areal yang cukup luas dengan tanah beserta segala isinya yang di dalamnya tumbuh berbagai jenis pohon bersama-sama organisme lain, nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lain secara lestari (Bab I Pasal 1 Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/Kpt-II/2001).

Ada beberapa fungsi hutan, yaitu hutan mempunyai fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Hutan yang mempunyai fungsi konservasi adalah kawasan hutan dengan karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sementara yang dimaksud dengan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Undang-undang RI No. 41 Bab I pasal 1 tentang Kehutanan). Maksud dari hasil hutan dapat berupa kayu maupun non kayu. Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan fisik, topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Mendasarkan pada karakteristik khusus pada hutan tersebut manusia dapat memanfaatkan sumberdaya hutan yang terkandung di dalamnya,

BAB II KAJIAIN PUSTAKA

2.1. Teori Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Pengalaman pembangunan di Indonesia yang dijalankan selama beberapa puluh tahun dengan menggunakan pola sentralistik terbukti memiliki banyak kekurangan, terutama dalam memberdayakan masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya, sehingga berkembanglah otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1999. Hakikat otonomi adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat, sehingga dalam program pembangunan masyarakat tidak lagi dianggap sebagai objek dari pembangunan, tetapi menjadi subjek/pelaku dari pembangunan (Sumaryadi, 2005: 84).

Meskipun tujuan utama yang hendak dicapai dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan menciptakan masyarakat sejahtera secara fisik, mental maupun sosial, namun pendekatan yang digunakan dalam pembangunan harus senantiasa mengutamakan proses daripada hasil. Pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006).

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, artinya mencoba memahami dan mendeskripsikan secara mendalam kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan serta kondisi lingkungan dari hutan yang bersangkutan. Dengan mengetahui kondisi sosial ekonomi serta lingkungan masyarakat sekitar hutan, maka akan dapat disusun suatu model dan strategi pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari dan berkelanjutan.

3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam kajian ini adalah masyarakat desa sekitar hutan, sekaligus wilayah hutan setempat di mana masyarakat tinggal dan menetap. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposif di Kabupaten Jember karena daerah ini termasuk wilayah yang memiliki lahan hutan cukup luas (3.293,34 Ha) di Propinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah kawasan hutan yang berada di Kecamatan Tempurejo dengan alasan bahwa Kecamatan Tempurejo adalah kecamatan yang setiap tahunnya terjadi banjir sebagai akibat dari adanya pengrusakan hutan oleh masyarakat, di samping alasan karena Tempurejo kawasan hutannya berada di bawah tiga pengelola sekaligus, yaitu Perhutani, Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah III, serta Balai Taman Nasional (BTN) Meru Betiri. Dengan begitu diharapkan karakteristik dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing pihak akan terlihat perbedaannya, sehingga kebijakan yang akan digulirkan nanti dapat berupa kombinasi dari ketiganya. Penentuan responden dilakukan secara cluster, sesuai dengan wilayahnya. Tahapan pemilihan responden adalah sebagai berikut: 1) mengadakan stratifikasi populasi, yaitu mengklasifikasikan populasi menjadi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

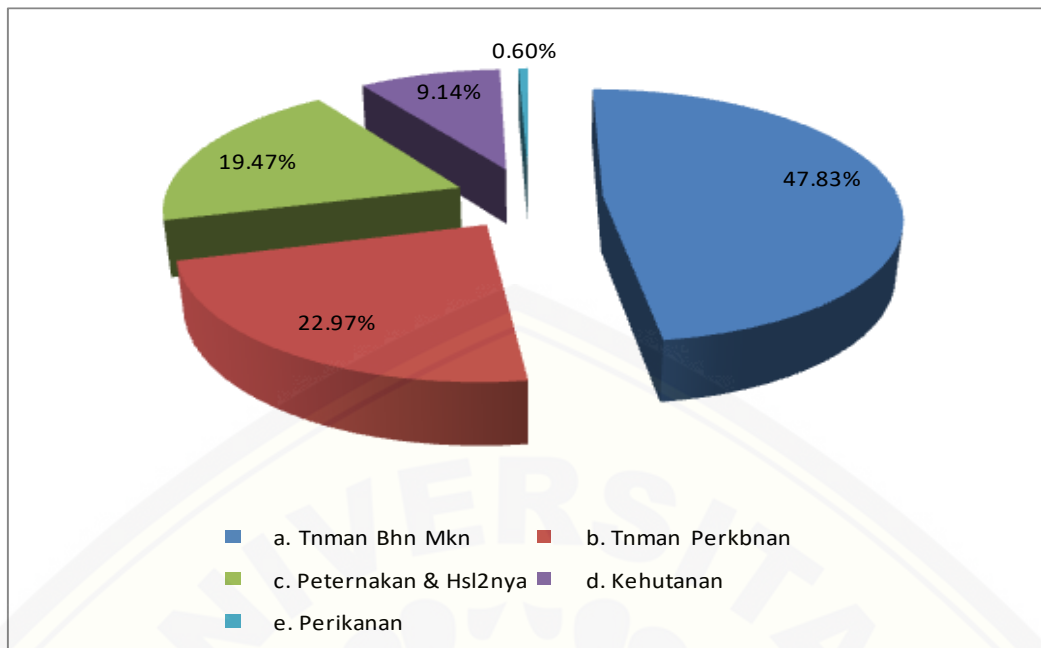
4.1. Kondisi Geografis Kabupaten Jember Secara Umum

Wilayah Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada 6°27'9" s/d 7°14'33" Bujur Timur dan 7°59'6" – 8°33'56" Lintang Selatan. Memiliki luas 3.293,339 Km² dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Secara umum Kabupaten Jember beriklim sedang, dengan curah hujan antara 0 sampai dengan 2500 mm/tahun. Sebagaimana musim di kawasan tropis, Kabupaten Jember terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Januari s/d Juni, dan bulan Oktober s/d Desember, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juli s/d September. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografis dan perputaran atau pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Jember berkisar antara 48,6 sampai 257,8 mm³. Atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusabarong. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso
- Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang

Kabupaten Jember terbagi atas 31 Kecamatan dan 247 Desa. Pembagian wilayah per kecamatan dapat terlihat dalam Gambar 4.1.



Sumber: Tabel 4.2

Gambar 4.6 Rata-rata Kontribusi Subsektor Pertanian Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Selama Kurun Waktu 2009 – 2012

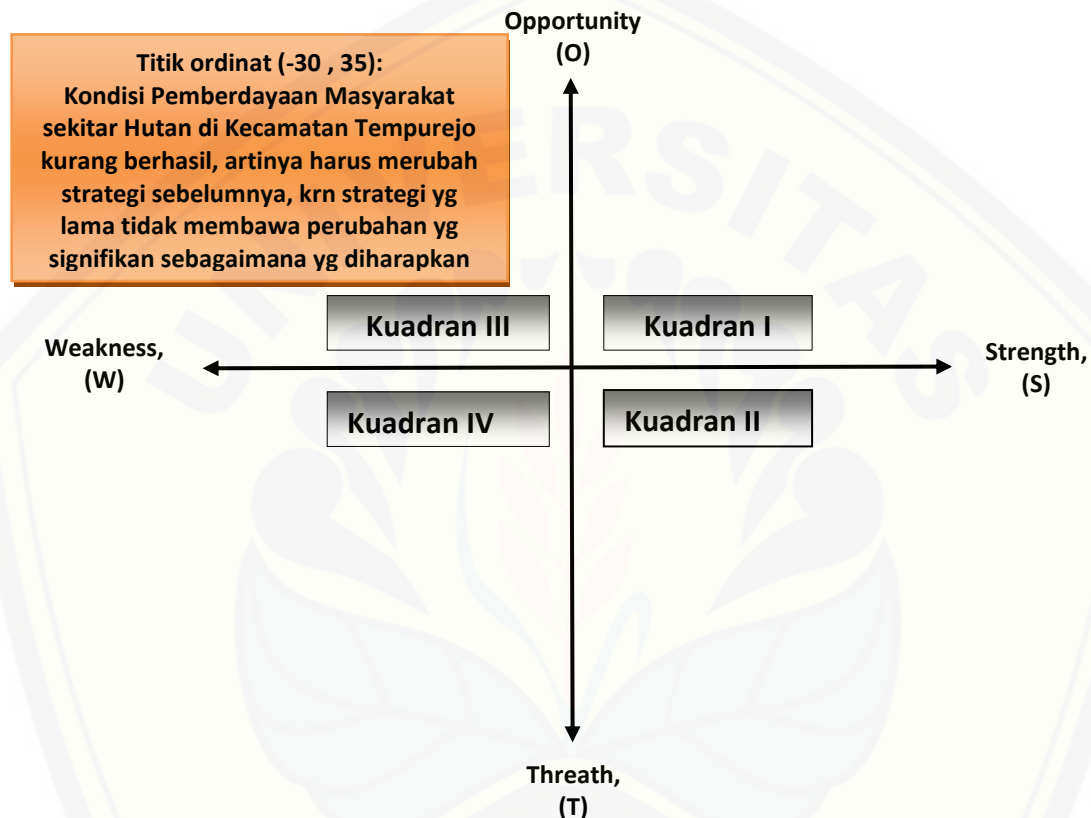
4.5 Hasil Penelitian

4.5.1 Konsep Pemberdayaan di Kecamatan Tempurejo

Paradigma baru pembangunan kehutanan dewasa ini lebih menekankan bahwa hutan dipandang sebagai sumberdaya secara komprehensif (*Forest Resource Based Management*) dengan menitikberatkan pada pembangunan kehutanan bersama masyarakat (*Community Development*). Dengan demikian salah satu pendekatan pembangunan kehutanan adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial yang merupakan cerminan dari paradig baru pembangunan kehutanan yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*”.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan, utamanya di

Dari Tabel 4.9 tersebut di atas akan diperoleh macam-macam strategi yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan permasalahan pemberdayaan masyarakat desa hutan di Kecamatan Tempurejo. Sementara untuk mengetahui *existing condition* kondisi hutan di Kecamatan Tempurejo sendiri dapat dilihat dalam Gambar 4.21



Gambar 4.21 Analisis SWOT

Dari Gambar 4.21 dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan terkait dengan pengembangan ekonomi masyarakat desa hutan pada tempo dulu sudah tidak kondusif lagi, artinya strategi yang ada tersebut perlu diubah sehingga diperoleh kemanfaatan maksimal dari sumberdaya hutan yang ada, sekalipun tanpa harus memaanfaatkannya secara berlebihan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat pengrusakan hutan selama ini harus ditindak dengan tegas. Supremasi hukum harus ditegakkan. Hal ini harus menjadi komitmen bersama dari semua Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Secara Lestari dan Berkelanjutan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa situasi dan kondisi yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat kawasan hutan di Kecamatan Tempurejo umumnya tergolong miskin. Mayoritas penduduknya berpendidikan tidak tamat SD serta pendapatan per kapita penduduk masih rendah, sehingga keberadaan hutan belum sepenuhnya membantu mengatasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat setempat sekalipun dimanfaatkan secara berlebihan.
2. Kondisi hutan di bawah kewenangan Perhutani yang ada nyaris gundul, karena sumberdaya hutan tegakan hampir tidak ada setelah terjadi pemanfaatan sumberdaya hutan secara berlebihan pada periode tahun 1998 – 1999. Kalaupun ada pohon, itu adalah baru mulai ditaman kembali setelah terjadi perambahan hutan. Dilakukan gerakan sengonisasi dengan waktu panen adalah 5 tahun. Di Curahtakir banyak sengon yang dipanen pada saat masih berumur 2 tahun.
3. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dikatakan bahwa diversifikasi usaha pemanfaatan sumberdaya hutan non tegakan meliputi usaha tanaman tumpangsari yang ada di hutan penyangga TNMB maupun hutan di bawah pengelolaan Perhutani mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan menjadi usaha yang mempunyai nilai ekonomis tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kalau sumberdaya ini dikelola dengan baik (dari sektor perekonomian maupun industri pariwisata), maka tidak menutup kemungkinan kontribusi pendapatan non tegakan hutan hampir seimbang dengan kontribusi pendapatan dari tegakan hutan.
4. Faktor penunjang pemanfaatan sumberdaya hutan relatif kurang memadai guna mendukung usaha pengembangan kawasan Hutan di Kecamatan